

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu aspek yang berperan penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tuntutan zaman yang semakin berkembang. Berhasilnya pendidikan tergantung pada pengelolaan dan manajemennya dan sumber daya manusia yang handal yang membidangi pendidikan itu sendiri. Namun demikian, pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat. Salah satu permasalahannya adalah rendahnya kualitas proses dan hasil pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan yang ada. Pemerintah terus melakukan pembenahan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia antara lain dengan mengkaji ulang kurikulum, memberikan pelatihan bagi guru-guru serta melakukan studi banding antar kepala sekolah.

Jacques Delors selaku Ketua Komisi Internasional PBB tentang Pendidikan abad 21 mengemukakan tujuh macam ketegangan yang akan terjadi serta menjadi ciri dan tantangan pendidikan abad 21 (Mudyahardjo, 2002:11). Adapun ketegangan menjadi ciri dan tantangan pendidikan abad 21, sebagai berikut: (1) ketegangan antara globalisasi dan lokal di mana orang secara berangsur-angsur perlu menjadi warga dunia; (2) ketegangan antara universal dengan individu di mana kebudayaan pasti menjadi bersifat global dan tradisi-tradisi budaya yang tidak terawat dengan baik akan terancam dengan perkembangan mutakhir; (3) ketegangan antara tradisi dan kemandirian; (4) ketegangan antara pertumbuhan-

pertumbuhan jangka panjang dengan jangka pendek. Oleh karena itu perlu adanya pemecahan masalah yang segera; (5) ketegangan antara perlunya kompetisi dengan adanya kesamaan kesempatan, tekanan kompetensilah yang menyebabkan para pengambil keputusan berada pada posisi kehilangan misinya; (6) ketegangan antara perluasan pengetahuan yang berlimpah-ruah dengan kemampuan manusia mencemarakannya; (7) ketegangan antara spiritual dan material, sering kita samakan tanpa menyadari dunia mempunyai keinginan yang sering tidak terungkap.

Dalam kondisi apapun komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan hendaknya tidak berubah bahkan harus terus berusaha meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan. Pada tahun 1999 pemerintah mengadopsi pemikiran baru dari Negara-negara maju dibidang pendidikan yakni *school based manajemen* (SBM) yang dikenal sebagai manajemen berbasis sekolah (MBS) sebagai upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi, (Mulyasa, 2004). Bank Dunia (1999) dalam Mulyasa (2004:11) memberikan pengertian bahwa manajemen berbasis sekolah merupakan bentuk alternatif sekolah dalam program desentralisasi dalam bidang pendidikan, yang ditandai oleh otonomi luas ditingkat sekolah, partisipasi masyarakat dan dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Berkaitan dengan manajemen Gaffar dalam Mulyasa (2004:29) mengemukakan bahwa manajemen pendidikan mengandung arti sebagai suatu proses kerja sama yang sistematis, sistemik, dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan abad 21 menuntut kebijakan pemerintah agar pengelolaan pendidikan diarahkan pada desentralisasi (Nurcholis, 2003). Lahirnya Undang-

undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan pusat dan daerah membawa konsekuensi terhadap kewenangan daerah dalam mengatut daerahnya termasuk mengenai otonomi dalam pendidikan ini menuntut partisipasi masyarakat secara aktif untuk merealisasikan pendidikan.

Sutikno (2004) menyatakan pada abad 21 ini tuntutan pendidikan diarahkan pada peningkatan kualitas kemampuan intelektual dan profesional serta sikap, kepribadian dan moral Indonesia pada umumnya agar dapat mendudukkan diri secara martabat dalam masyarakat di era globalisasi.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa satuan pendidikan sebagai organisasi yang khas mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selain itu, satuan pendidikan juga merupakan institusi yang melaksanakan proses pendidikan dan proses sosial sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensi dan memperoleh bekal untuk kehidupan di masyarakat.

Pusat Pengembangan Penataran Guru Tertulis, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementrian Pendidikan Nasional (2004) menyatakan tujuan utama MBS adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mutu pendidikan. Peningkatan efisiensi dan mutu pendidikan diperoleh melalui kelenturan dan pengelolaan sekolah yang melibatkan kepala sekolah, guru, staf sekolah dan masyarakat yang luas. Kerjasama antara kepala sekolah, guru dan masyarakat dalam pengambilan keputusan- keputusan yang berkaitan dengan

menajemen sekolah mendorong rasa kepemilikan yang lebih tinggi dari guru dan masyarakat. Pada akhirnya mereka akan menggunakan sumber daya seefisien mungkin untuk mencapai hal yang optimal. Profesionalisme dan akuntabilitas kerja sangat dibutuhkan dalam pengembangan sekolah yang bermutu. Profesionalisme berarti harus dimulai dari pembuatan program kerja, pengorganisasian sekolah dan pengelolaan sekolah.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban sekolah dalam melaksanakan program MBS, pertanggungjawaban yang dimaksud adalah mencakup bagaimana sekolah tetap menegakkan: (1) kesesuaian antara tujuan pendidikan yang telah dirumuskan oleh dinas pendidikan diwilayah otonominya dengan falsafah, moral dan etika yang diakui masyarakat luas, (2) kesesuaian antara tujuan pendidikan di daerah dengan proses kegiatan serta hasil dan dampak (kompetensi lulusan yang dicapai), (3) keterbukaan terhadap pihak-pihak luar yang berkepentingan atau yang memiliki kewenangan dengan pendidikan (*stakeholder*) untuk melakukan penilaian atau evaluasi terhadap proses dan hasil pendidikan, (4) pertanggungjawaban mengenai pemamfaatan sumber daya (finansial maupun insani) dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh sekolah, (5) kesadaran personil sekolah dan masyarakat bahwa profesionalisme lebih diutamakan.

Semua keberhasilan dari MBS, pada akhirnya ditentukan oleh unsur yang berada di front terdepan yaitu para guru. Guru adalah unsur manusiawi dalam mencapai tujuan pendidikan. Gurun adalah figur manusia, yang menempati posisi dan memegang peranan penting dalam pendidikan. Tanpa guru, pendidikan hanya

akan menjadi slogan muluk karena segala bentuk kebijakan dan program pada akhirnya akan ditentukan oleh kinerja guru dalam melaksanakannya.

Implementasi manajemen berbasis sekolah merupakan usaha untuk memberdayakan potensi yang ada disekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. salah satu langkah konkret peningkatan mutu pendidikan adalah pemberdayaan sekolah agar mampu berperan sebagai subjek penyelenggara pendidikan yang menyajikan pendidikan yang bermutu. Penerapan MBS merupakan suatu bidang reformasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bangsa Indonesia.

Hasil penelitian yang dilakukan Maulana Hasanuddin (2015:1) bahwa pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SMK Ma'arif NU 2 Karanglewas sudah berjalan cukup baik, walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala maupun hambatan pada masing-masing komponen bidang manajemen sekolah, namun hal itu menjadikan motivasi bagi sekolah untuk memunculkan kreatifitas sekolah dalam mengembangkan program-program yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki sekolah guna meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

Mutu pendidikan sekolah dasar ditentukan oleh beberapa komponen. Direktorat Pendidikan Dasar (Ibrahim Bafadal, 2003: 25) menyatakan ada lima komponen yang menentukan mutu pendidikan, yaitu: 1) kegiatan belajar mengajar, 2) manajemen pendidikan yang efektif dan efisien, 3) buku dan sarana belajar yang memadai dan selalu dalam kondisi siap pakai, 4) fisik dan penampilan sekolah yang baik, dan 5) partisipasi aktif masyarakat.

Sedangkan Siti Aminah, dkk (2015:1) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) Program kerja kepala madrasah dalam kegiatan pendidikan difungsikan dengan baik dan benar, hanya saja dalam aspek manajemen tenaga kependidikan, manajemen keuangan, dan pembiayaan perannya belum dijalankan secara optimal; (2) Strategi penerapan manajemen berbasis sekolah dilakukan melalui: (a) tahapan sosialisasi, (b) perumusan visi, misi dan tujuan sekolah, (c) melibatkan sejumlah sumber daya pendidikan untuk ketercapaian program sekolah, (d) melakukan analisis SWOT terhadap program pendidikan yang sudah dilaksanakan, (e) penyusunan rencana dan program kerja peningkatan mutu, dan (f) pelaksanaan program dan evaluasi; dan (3) Kendala yang dihadapi kepala madrasah dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah antara lain kemandirian sekolah dan manajemen pengelolaan anggaran belum dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Jumari (2017: 178) menemukan implementasi Berbasis Sekolah merupakan suatu model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah termasuk guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua siswa, dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Sementara hambatan dalam implementasi MBS di SMAN 1 Raman Utara adalah kurangnya peran serta komite sekolah dalam pelaksanaan MBS di sekolah dan sikap sebagian kecil orangtua yang masih acuh tak acuh terhadap perkembangan anak di sekolah. Dan upaya yang sudah dilakukan dalam mengatasi hambatan implementasi MBS di SMAN 1 Raman Utara adalah dengan: a) Melakukan

sosialisasi MBS kepada orang tua siswa pada saat pembagian raport kenaikan kelas. b) Menyampaikan laporan tertulis kepada pihak komite sekolah terkait dengan program-program MBS, serta kendala yang dihadapi sekolah dan bantuan yang diperlukan sekolah.

Jalaluddin (2016:1) dalam penelitiannya menunjukkan hasil analisis data bahwa implementasi manajemen berbasis sekolah oleh kepala sekolah di SMA Negeri Kabupaten Aceh Utara telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan. disamping itu kepala sekolah selalu mencari solusi dalam tiap permasalahan dalam menjalankan MBS.

Konsep ini mengacu pada teori *effective school* yang lebih memfokuskan diri pada perbaikan proses pendidikan. Beberapa indikator yang menunjukkan karakter dari konsep manajemen ini antara lain lingkungan sekolah yang aman dan tertib, sekolah memiliki misi dan target mutu yang ingin dicapai, sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat, adanya harapan yang tinggi dari personel sekolah (kepala sekolah, guru, dan siswa) untuk berprestasi. Pengembangan konsep MBS didesain untuk meningkatkan kemampuan sekolah dalam mengelola perubahan pendidikan kaitannya dengan tujuan keseluruhan, kebijakan, strategi perencanaan, inisiatif kurikulum yang telah ditentukan oleh pemerintah dan otoritas pendidikan. Pendidikan ini menuntut adanya perubahan sikap dan tingkah laku seluruh komponen sekolah; kepala sekolah, guru dan staf administrasi termasuk orang tua dan masyarakat.

Secara umum, manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu

dan teknologi, yang ditunjukkan dengan pernyataan politik dalam Garis Besar Haluan Negara (Mulyasa, 2004:11). Secara konseptual MBS dipahami sebagai salah satu alternatif pilihan formal untuk mengelola struktur penyelenggaraan pendidikan yang terdesentralisasi dengan menempatkan sekolah sebagai unit utama. Konsep ini menempatkan redistribusi kewenangan para pembuat kebijakan sebagai elemen paling mendasar, untuk meningkatkan kualitas hasil pendidikan.

Kepala sekolah harus tampil sebagai koordinator dari sejumlah orang yang mewakili berbagai kelompok yang berbeda dalam masyarakat untuk memberikan masukan dan saran-saran perbaikan. Sementara sekolah secara profesional harus terlibat dalam setiap proses perubahan melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kualitas total dengan menciptakan kompetisi dan penghargaan di dalam sekolah itu sendiri maupun sekolah lain. Sistem kompetisi tersebut mendorong sekolah untuk terus meningkatkan diri, sedangkan penghargaan akan dapat memberikan motivasi dan meningkatkan kepercayaan diri setiap personil sekolah, khususnya siswa. Jadi sekolah harus mengontrol semua sumber daya termasuk sumber daya manusia yang ada, dan lebih lanjut harus menggunakan secara lebih efisien sumber daya tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat bagi peningkatan mutu pendidikan.

Kekuatan manajemen pendidikan diarahkan untuk lebih memberdayakan sekolah sebagai unit pelaksanaan terdepan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Hal ini sesuai dengan pendapat Stoner dalam Mustari (2014:2) manajemen sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi pekerjaan organisasi dan untuk menggunakan semua sumber daya organisasi yang

tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang dinyatakan dengan jelas. Dimaksudkan agar sekolah lebih mandiri dan bersikap kreatif, dapat mengembangkan iklim kompetitif antarsekolah di wilayahnya, serta bertanggung jawab terhadap *stakeholders* pendidikan, khususnya orang tua dan masyarakat yang di era otonomi ini akan menjadi dewan sekolah. Dalam pelaksanaannya, manajemen pendidikan harus lebih terbuka, *accountable*, mengoptimalkan partisipasi orang tua dan masyarakat, serta dapat mengelola semua sumber daya yang tersedia di sekolah dan lingkungannya untuk digunakan seluas-luasnya bagi peningkatan prestasi siswa dan mutu pendidikan pada umumnya.

Pelaksanaan MBS secara efektif dan efisien menuntut seorang kepala sekolah yang memiliki pandangan luas tentang sekolah dan pendidikan. Wibawa kepala sekolah harus ditumbuh kembangkan dengan meningkatkan sikap kepedulian, semangat belajar, disiplin kerja, keteladanan dan hubungan manusiawi sebagai modal perwujudan iklim kerja yang kondusif. Kepala sekolah dituntut untuk melakukan fungsinya sebagai manajer sekolah dalam meningkatkan proses belajar mengajar, dengan melakukan supervisi kelas, membina, dan memberikan saran-saran positif kepada guru. Disamping itu, kepala sekolah juga harus melakukan tukar pikiran, sumbang saran, dan studi banding antar sekolah untuk menyerap kiat-kiat kepemimpinan dari kepala sekolah lain.

Pelaksanaan MBS juga menuntut guru untuk berkreasi dalam meningkatkan manajemen kelas. Guru adalah teladan dan panutan langsung peserta didik di kelas. Oleh karena itu, guru perlu siap dengan segala kewajiban, baik manajemen maupun persiapan isi materi pelajaran. Guru juga harus mengorganisasikan kelasnya dengan

baik mulai jadwal pelajaran, pembagian tugas peserta didik, kebersihan dan ketertiban kelas, pengaturan tempat duduk peserta didik dan penempatan media pembelajaran pada tempatnya. Manajemen tenaga kependidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap pada kondisi yang menyenangkan (Mulyasa, 2004:42).

Penerapan MBS membawa pencerahan baru bagi guru karena fokus utama MBS lebih ditekankan pada pemberdayaan sekolah termasuk upaya yang lebih efektif untuk memberdayakan guru dalam berbagai perubahan. Guru menempati posisi sentral dalam arti pemberdayaan secara profesionalisme dan proporsional. Selama ini upaya mutu pendidikan selalu mengabaikan guru (terutama kesejahteraan). Guru sebagai insan pendidikan harus lebih diperankan sebagai subjek dan bukan sebagai objek dengan diberlakukan sebagai mitra dan bukan bawahan.

Penerapan manajemen pendidikan melalui MBS harus dapat memberikan jaminan agar para guru dapat mengembangkan ide-idenya dalam tugas tenaga pendidik untuk mengembangkan dirinya secara profesional sebagai pelaksana pendidikan, Khususnya ditingkat instruksional dan institusional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada guru. Disamping itu MBS juga dapat memberikan umpan balik terhadap kontribusi guru, termasuk insentif kerja yang memadai sesuai dengan yang dilakukan atau dikerjakan, pengembangan dan pengajaran yang baik memperhitungkan hak-hak guru yang diterimanya untuk berkontribusi dalam pembuatan keputusan yang berkenan

dengan mereka, dan meningkatkan hubungan serta komunikasi yang baik antara guru dengan pihak pendidikan lainnya seperti orangtua dan pengelola serta pejabat pendidikan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam pembinaan guru adalah dengan mengaktifkan kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada guru dalam bertukar menukar pengalaman dengan guru lain maupun sebagai pemandu pelajaran. Di samping itu, kepala sekolah juga dapat melakukan kegiatan supervisi kelas untuk melihat keberhasilan guru dalam pelaksanaan pengajaran yang akan menunjang pada peningkatan profesionalitas guru. Tetapi dalam kenyataannya, pelaksanaan MBS menuju pemberdayaan guru belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini antara lain disebabkan karena manajemen kepemimpinan kepala sekolah masih bersifat tertutup. Kurangnya transparansi kepala sekolah tentunya akan berpengaruh dalam implementasi MBS menuju pemberdayaan guru.

Guru memegang peranan yang amat penting dalam upaya pengembangan sumber daya manusia melalui proses pendidikan. Namun pada kenyataannya, nasib guru sering terabaikan dalam perwujudan keberdayaannya sebagai insan pendidikan terutama dalam hal pengembangan diri, kreativitas dan inovasi yang masih sangat kurang.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Kabupaten Dairi khususnya kecamatan Sumbul yaitu SMA Negeri 1 Sumbul sebagai objek penelitian. Salah satu alasannya adalah karena SMA Negeri 1 Sumbul merupakan satu-satunya sekolah menengah atas negeri yang terdapat di Kecamatan Sumbul Kabupaten

Dairi. Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Sumbul adalah sistem pendidikan yang terintegrasi, penerapan kurikulum 2013 (K-13) kecuali kelas XII, konsep belajar dengan sistem *active learning* (pembelajaran aktif), kegiatan ekstra kurikuler yang bervariasi, pendidik/tenaga kependidikan yang sudah hampir 100% berpredikat sebagai guru profesional yang berdedikasi tinggi, serta lingkungan yang strategis.

Dari hasil wawancara awal pada bulan Juni 2017 kepada 6 orang guru, 3 orang pegawai tata usaha dan 3 orang pengurus komite SMA Negeri 1 Sumbul Kabupaten Dairi, diperoleh informasi bahwa selama dua tahun terakhir sekolah mengalami kemunduran terutama kurang efektifnya kerja wakil kepala sekolah, tingkat kedisiplinan guru yang menurun, kurang efektifnya proses belajar mengajar dan prestasi siswa yang menurun dalam berbagai ajang kompetisi. Selain itu orang tua murid yang terhimpun dalam wadah komite sekolah masih jarang diajak untuk terlibat dalam kegiatan sekolah di luar masalah kekurangan dana. Kondisi ini dapat dinyatakan menggambarkan kurang optimalnya sumber daya sekolah dan implementasi manajemen berbasis sekolah belum terlaksana dengan baik.

SMA Negeri 1 Sumbul Kabupaten Dairi adalah satu-satunya SMA negeri yang ada di Kecamatan Sumbul yang berdiri pada tahun 1982 dan sampai saat ini telah mengalami tujuh kali pergantian kepala sekolah berdasarkan profil sekolah sampai tahun 2017. Sekolah telah meraih 145 prestasi mulai tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan tingkat nasional, memiliki 52 guru dan 9 orang Tata Usaha, dan T.A 2017/2018 memiliki 933 orang siswa.

Berdasarkan informasi tersebut, menimbulkan rasa ingin tahu bagaimana pelaksanaan MBS di SMA Negeri 1 Sumbul Kabupaten Dairi. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya terlihat pelaksanaan MBS yang masih beragam di lapangan, kurangnya pengetahuan kepala sekolah, guru, orangtua murid, seperti apa pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Kurangnya pengetahuan tersebut mengakibatkan rendahnya partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam mendorong pelaksanaan MBS dalam praktek pengelolaan pendidikan di sekolah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang berkaitan dengan berbagai persoalan yang melingkupi implementasi MBS, maka deskripsi faktual tentang kinerja kolektif penerapan MBS yang memberdayakan kepala sekolah, guru, siswa, pegawai TU, dan komite sekolah di SMA Negeri 1 Sumbul Kabupaten Dairi dalam konteks manajemen pendidikan merupakan fenomena yang sangat urgen untuk diungkap melalui penelitian dengan judul “**Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMA Negeri 1 Sumbul Kabupaten Dairi**”

1.2 Fokus Penelitian.

Penelitian ini difokuskan pada deskripsi pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SMA Negeri 1 Sumbul Kabupaten Dairi dengan subfokus, yaitu (1) proses implementasi manajemen berbasis sekolah, (2) masalah dan solusi manajemen berbasis sekolah, (3) dampak pelaksanaan manajemen berbasis sekolah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian sebagaimana dikemukakan di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses implementasi manajemen berbasis sekolah di SMA Negeri 1 Sumbul Kabupaten Dairi?
- b. Bagaimana permasalahan dan solusi dalam penerapan manajemen berbasis sekolah di SMA Negeri 1 Sumbul Kabupaten Dairi?
- c. Bagaimana dampak positif dari manajemen berbasis sekolah di SMA Negeri 1 Sumbul?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah

- a. Untuk mengetahui proses implementasi manajemen berbasis sekolah di SMA Negeri 1 Sumbul Kabupaten Dairi?
- b. Untuk mengetahui permasalahan dan solusi dalam penerapan manajemen berbasis sekolah di SMA Negeri 1 Sumbul Kabupaten Dairi.
- c. Untuk mengetahui dampak positif dari manajemen berbasis sekolah di SMA Negeri 1 Sumbul Kabupaten Dairi.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu teoritis dan praktis.

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya teori-teori manajemen pendidikan dalam kaitannya dengan manajemen berbasis sekolah. Melalui

penelitian yang dilakukan ini dapat diungkapkan keragaman model implementasi manajemen berbasis sekolah sesuai dengan kultursosial dan kebutuhan sekolah yang dapat memperkaya keragaman pengimplementasian manajemen berbasis sekolah. Dengan mengkaji pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, dapat dipahami secara utuh wujud pelaksanaan manajemen berbasis sekolah.

b. Secara Praktis

1) Bagi kepala sekolah, guru dan staff SMA Negeri 1 Sumbul,

Penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan manfaat praktis bagi praktek pengelolaan pendidikan di SMA Negeri 1 Sumbul demi perbaikan pengelolaan sekolah kedepannya.

2) Kepala sekolah sejenis

Dapat dijadikan bahan masukan bagi kepala sekolah dan guru dalam melakukan suatu perencanaan pendidikan yang tepat dan efektif.

3) Kepala Dinas Pendidikan

Sebagai bahan rujukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program Manajemen Berbasis Sekolah di tingkat SMA/Sederajat

4) Peneliti lain

Sebagai bahan rujukan penelitian yang relevan dan rekomendasi untuk pengembangan penelitian berikutnya.